Dharma dan Artha sebagai Landasan Etis Kesejahteraan: Reorientasi Pendidikan Agama Hindu dalam Perspektif Keadilan Sosial-Ekonomi

Oleh:
I Ketut Angga Irawan
Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung
ketutanggairawan@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian material, tetapi juga oleh landasan etis yang mengarahkan cara manusia memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya serta hubungannya dengan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif Hindu, relasi *dharma* dan *artha* menyediakan kerangka untuk memahami kesejahteraan dengan mengintegrasikan dimensi material, moral, dan sosial, namun keterkaitannya dengan keadilan sosial-ekonomi belum banyak dirumuskan secara sistematis dalam konteks Pendidikan Agama Hindu. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi *dharma* dan *artha* sebagai landasan etis kesejahteraan serta merumuskan implikasinya bagi reorientasi Pendidikan Agama Hindu dalam perspektif keadilan sosial-ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui *integrative literature review* yang dipadukan dengan analisis konseptual-filosofis terhadap teks keagamaan Hindu, artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi *dharma–artha* membentuk struktur etis kesejahteraan melalui legitimasi etis dalam memperoleh sumber daya, tanggung jawab dalam pengelolaan, dan orientasi moral dalam pemanfaatannya. Relasi tersebut memperluas orientasi kemakmuran individual menuju kesejahteraan sosial dan menghasilkan tiga dimensi keadilan sosial-ekonomi, yaitu keadilan dalam proses memperoleh *artha*, keadilan dalam relasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan *artha*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi *dharma–artha* dapat menjadi landasan bagi reorientasi Pendidikan Agama Hindu melalui penguatan pemahaman etis, penalaran terhadap persoalan sosial-ekonomi, dan aktualisasi tanggung jawab sosial sehingga pembelajaran *Catur Purusa Artha* tidak hanya berorientasi pada pemahaman tujuan kehidupan, tetapi juga membentuk kemampuan peserta didik dalam memaknai dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Kata kunci: *dharma–artha*; kesejahteraan; keadilan sosial-ekonomi; Pendidikan Agama Hindu; *Catur Purusa Artha*

Abstract

Welfare is determined not only by material attainment but also by the ethical foundations that guide how individuals acquire, manage, and utilize resources and how these practices relate to collective well-being. From a Hindu perspective, the relationship between dharma and artha provides a framework for understanding welfare by integrating material, moral, and social dimensions; however, its connection to socio-economic justice has not been systematically conceptualized within the context of Hindu Religious Education. This study aims to analyze the relationship between dharma and artha as an ethical foundation for welfare and to formulate its implications for the reorientation of Hindu Religious Education from the perspective of socio-economic justice. This study employs a qualitative approach through an integrative literature review combined with conceptual-philosophical analysis of Hindu religious texts, scholarly articles, academic books, and relevant official documents. The findings indicate that the dharma–artha relationship establishes an ethical structure of welfare encompassing ethical legitimacy in resource acquisition, responsibility in resource management, and moral

orientation in resource utilization. This relationship broadens the orientation of individual prosperity toward social welfare and generates three dimensions of socio-economic justice: justice in the process of acquiring artha, justice in economic relations, and social responsibility in the utilization of artha. This study concludes that the dharma–artha relationship can provide a foundation for reorienting Hindu Religious Education by strengthening ethical understanding, developing reasoning about socio-economic issues, and fostering the actualization of social responsibility. Accordingly, the teaching of Catur Purusa Artha can extend beyond understanding the goals of life to developing students' capacity to interpret and promote just and socially oriented welfare.

Keywords: dharma–artha; welfare; socio-economic justice; Hindu Religious Education; Catur Purusa Artha

I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan salah satu orientasi fundamental pembangunan yang tidak dapat diukur semata-mata melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas material masyarakat. Konsep kesejahteraan mencakup berbagai dimensi kehidupan serta berkaitan dengan distribusi sumber daya dan capaian pembangunan di antara kelompok masyarakat (Shiba et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, persoalan ketimpangan masih menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2026) mencatat bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur menggunakan *Gini ratio*, mencapai 0,368 pada Maret 2026. Angka tersebut meningkat sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi September 2025 yang tercatat sebesar 0,363. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, *Gini ratio* di daerah perkotaan mencapai 0,387, sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 0,296. Data tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kesejahteraan tidak cukup berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi individual, tetapi juga perlu mempertimbangkan distribusi sumber daya, kesempatan, dan hasil pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan memiliki dimensi etis yang berkaitan dengan relasi antara kemakmuran individual, ketimpangan sosial-ekonomi, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Pemaknaan kesejahteraan yang bertumpu pada pencapaian material belum sepenuhnya merepresentasikan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup, tetapi peningkatan tersebut tidak selalu menghasilkan capaian kesejahteraan yang setara pada setiap dimensi kehidupan dan kelompok masyarakat. Penelitian Michálek et al. (2023) menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan multidimensional lebih rendah dibandingkan pengaruhnya terhadap kemiskinan berbasis pendapatan, sehingga peningkatan kapasitas ekonomi perlu disertai kebijakan sosial yang mampu menjangkau dimensi kesejahteraan secara lebih luas. Sejalan dengan perspektif tersebut, Fioramonti et al. (2022) menempatkan kesejahteraan manusia dan ekologis sebagai orientasi utama ekonomi, melampaui paradigma yang menitikberatkan keberhasilan pada pertumbuhan material. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar sumber daya ekonomi yang dapat diperoleh, tetapi juga dengan kualitas kehidupan yang dihasilkan serta manfaatnya bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsepsi kesejahteraan memerlukan landasan etis yang mampu menempatkan pencapaian material dalam hubungannya dengan kepentingan sosial, tanggung jawab terhadap sesama, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Agama memiliki posisi penting dalam membentuk orientasi etis manusia terhadap kehidupan sosial dan ekonomi karena ajaran keagamaan tidak hanya mengatur dimensi spiritual, tetapi juga menyediakan prinsip moral dalam membangun relasi dengan sesama. Nilai-nilai keagamaan dapat membentuk norma sosial dan memberikan pertimbangan moral terhadap berbagai tindakan manusia, termasuk dalam memaknai kerja, kepemilikan, pemanfaatan sumber daya, serta tanggung jawab terhadap kelompok yang rentan. Birher (2025) menegaskan bahwa agama, bersama dengan etika dan hukum, memiliki peran dalam membentuk norma yang mengatur kehidupan sosial, terutama ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan kontemporer seperti ketimpangan sosial. Dalam ranah ekonomi, hubungan agama dan kesejahteraan juga menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai sumber moral yang memengaruhi pemaknaan terhadap kesejahteraan dan praktik sosial yang menyertainya (Ihsan et al., 2025). Perspektif tersebut menempatkan aktivitas ekonomi bukan semata-mata sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan material, melainkan sebagai bagian dari kehidupan manusia yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesejahteraan memerlukan perhatian terhadap nilai-nilai keagamaan yang dapat memberikan orientasi etis bagi pencapaian kemakmuran sekaligus tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Dalam filsafat Hindu, kesejahteraan material memperoleh kedudukan yang penting dalam kerangka tujuan kehidupan manusia melalui konsep *Catur Purusa Artha*. Kerangka tersebut menempatkan *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa* sebagai tujuan kehidupan yang saling berkaitan, sehingga pencapaian material tidak diposisikan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. *Artha* merepresentasikan kebutuhan terhadap sumber daya material yang diperlukan untuk menopang kehidupan, sedangkan *dharma* memberikan orientasi moral terhadap cara memperoleh dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Kajian Tiwari dan Tiwari (2023) menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi dalam tradisi India menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka etis dan sosial, dengan *dharma* berfungsi sebagai orientasi moral dan *artha* sebagai tujuan material yang sah dalam kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan Hindu, Sukantiasih (2024) juga menunjukkan bahwa *Catur Purusa Artha* menempatkan pencapaian kesejahteraan melalui *artha* dalam kerangka usaha yang benar dan selaras dengan nilai-nilai *dharma*. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam perspektif Hindu tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan mengakumulasi sumber daya material, tetapi juga oleh prinsip moral yang mendasari proses perolehan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, relasi antara *dharma* dan *artha* menyediakan landasan konseptual untuk menelaah kesejahteraan sebagai persoalan yang sekaligus memiliki dimensi material dan etis.

Relasi antara *dharma* dan *artha* tidak berhenti pada persoalan moralitas individual dalam memperoleh kekayaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam pemanfaatannya. *Sarasamuccaya* 261 menempatkan perolehan *artha* dalam landasan *dharma*, sedangkan kekayaan yang diperoleh diarahkan untuk memenuhi kepentingan *dharma*, *artha*, dan *kama*. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan material tidak semata-mata ditujukan bagi pemenuhan kepentingan pribadi, tetapi memiliki dimensi sosial melalui praktik *dana* atau *dana punia* sebagai bentuk pemberian dan kepedulian terhadap sesama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, 2022). Dimensi sosial ini dapat diperdalam melalui konsep *lokasamgraha*, yang menempatkan

tindakan manusia dalam orientasi pemeliharaan kehidupan dan kesejahteraan bersama. Singh dan Awasthy (2023) menjelaskan *lokasamgraha* sebagai orientasi tindakan yang melampaui kepentingan diri dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dalam aktivitas sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, *artha* yang berlandaskan *dharma* tidak hanya mengatur legitimasi moral dalam memperoleh kekayaan, tetapi juga mengandung tanggung jawab atas pemanfaatannya bagi kepentingan yang lebih luas. Perspektif ini membuka ruang untuk memahami kesejahteraan dalam filsafat Hindu sebagai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individual dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial.

Kerangka etis yang menghubungkan kesejahteraan individual dengan tanggung jawab sosial memiliki relevansi penting bagi Pendidikan Agama Hindu karena pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan cara pandang dan tindakan peserta didik dalam kehidupan sosial. Dalam kebijakan kurikulum nasional, Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti diarahkan untuk mengembangkan pemahaman terhadap ajaran Hindu sekaligus membentuk sikap, karakter, dan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). *Catur Purusa Artha* telah menjadi bagian dari materi Pendidikan Agama Hindu yang memperkenalkan *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa* sebagai tujuan kehidupan manusia. Namun, keberadaan konsep tersebut dalam materi pembelajaran belum dengan sendirinya menunjukkan sejauh mana relasi *dharma* dan *artha* dikembangkan sebagai kerangka etis untuk memahami persoalan kesejahteraan, tanggung jawab sosial, dan keadilan sosial-ekonomi. Sukantiasih (2024) menunjukkan bahwa pembelajaran *Catur Purusa Artha* memiliki relevansi dalam pembentukan karakter dan pengembangan moral peserta didik, tetapi pembahasannya masih lebih dominan ditempatkan dalam kerangka pendidikan karakter. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pengembangan orientasi Pendidikan Agama Hindu yang tidak hanya memperkenalkan *dharma* dan *artha* sebagai bagian dari tujuan kehidupan, tetapi juga mengaktualisasikan relasi keduanya sebagai landasan untuk memahami persoalan sosial-ekonomi dalam kehidupan kontemporer.

Kajian mengenai *Catur Purusa Artha* dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial-ekonomi telah berkembang melalui beberapa kecenderungan. Dalam bidang pendidikan, Sukantiasih (2024) mengkaji nilai-nilai *Catur Purusa Artha* dalam *Dharma Wacana* dan menunjukkan relevansinya terhadap pembentukan karakter serta perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Sementara itu, kajian dalam ranah ekonomi mulai menempatkan ajaran Hindu sebagai kerangka etis bagi aktivitas ekonomi. Sudarsana et al. (2025), misalnya, mengintegrasikan prinsip *dharma*, *artha*, dan keseimbangan material-spiritual dalam pembahasan kewirausahaan Hindu serta menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan kekayaan. Kecenderungan serupa terlihat dalam kajian pengelolaan keuangan berbasis *Catur Purusa Artha* yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dapat ditempatkan dalam kerangka moral, sosial, dan spiritual. Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa *Catur Purusa Artha* telah digunakan untuk menjelaskan pembentukan karakter maupun orientasi etis dalam aktivitas ekonomi. Namun, kajian pendidikan cenderung menempatkannya dalam ranah karakter dan moralitas peserta didik, sedangkan kajian ekonomi lebih banyak

membahas penerapan prinsip Hindu dalam praktik ekonomi dan pengelolaan sumber daya. Relasi *dharma* dan *artha* sebagai kerangka konseptual untuk membangun pemahaman mengenai kesejahteraan yang menghubungkan kemakmuran individual, tanggung jawab sosial, dan keadilan sosial-ekonomi dalam Pendidikan Agama Hindu masih memerlukan elaborasi yang lebih sistematis.

Kajian mengenai *Catur Purusa Artha* telah berkembang dalam ranah pendidikan maupun ekonomi dengan fokus yang beragam. Dalam bidang pendidikan, Sukantiasih (2024) mengkaji *Catur Purusa Artha* melalui pelaksanaan *Dharma Wacana* pada siswa sekolah dasar dan menunjukkan relevansinya dalam pembentukan nilai moral, spiritual, etika, serta karakter peserta didik. Sementara itu, dalam ranah ekonomi, Purbawangsa et al. (2023) mengkaji implementasi *Catur Purusa Artha* dalam pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan memaknai *dharma* sebagai kepatuhan terhadap aturan, *artha* sebagai pencapaian keuntungan, *kama* sebagai orientasi pengembangan, dan *moksa* sebagai upaya membangun keharmonisan dengan pemangku kepentingan. Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Dewi et al. (2025) yang menempatkan *dharma* dan *artha* dalam konteks kewirausahaan Hindu serta menekankan keseimbangan antara keberhasilan material, pemenuhan spiritual, pengelolaan kekayaan secara etis, dan tanggung jawab sosial. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa *Catur Purusa Artha* telah dikembangkan sebagai landasan pembentukan karakter dan orientasi etis dalam aktivitas ekonomi. Namun, relasi *dharma* dan *artha* belum banyak dielaborasi secara khusus sebagai landasan etis untuk membangun konsepsi kesejahteraan yang menghubungkan kemakmuran individual, tanggung jawab sosial, dan keadilan sosial-ekonomi dalam konteks Pendidikan Agama Hindu.

Berdasarkan kecenderungan kajian tersebut, persoalan yang masih memerlukan pendalaman bukan terletak pada keberadaan ajaran *Catur Purusa Artha* dalam Pendidikan Agama Hindu, melainkan pada pengembangan relasi *dharma* dan *artha* sebagai kerangka etis untuk memaknai kesejahteraan dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Materi Pendidikan Agama Hindu telah menempatkan *Catur Purusa Artha* sebagai bagian dari ajaran *susila* yang perlu diterapkan dalam kehidupan sosial, sementara kajian terdahulu juga telah menunjukkan relevansinya bagi pembentukan karakter dan moral peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; Sukantiasih, 2024). Namun, keterkaitan antara pencapaian *artha*, orientasi *dharma*, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial-ekonomi masih memerlukan formulasi konseptual yang lebih sistematis dalam konteks pendidikan. Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pembacaan integratif terhadap *dharma* dan *artha* sebagai landasan etis kesejahteraan yang menghubungkan pemenuhan kebutuhan material dengan tanggung jawab sosial dan keadilan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi konseptual *dharma* dan *artha* dalam membentuk pemaknaan kesejahteraan serta merumuskan implikasinya bagi reorientasi Pendidikan Agama Hindu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan Pendidikan Agama Hindu yang mampu menghubungkan ajaran keagamaan dengan persoalan kesejahteraan dan kehidupan sosial-ekonomi kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui *integrative literature review* yang dipadukan dengan analisis konseptual-filosofis. *Integrative literature review* digunakan untuk

mengidentifikasi, mengkritisi, dan menyintesis berbagai perspektif teoretis sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman konseptual yang lebih integratif terhadap suatu persoalan (Torraco, 2016). Sumber kajian meliputi teks keagamaan Hindu yang relevan dengan konsep *dharma*, *artha*, dan kesejahteraan; artikel ilmiah nasional dan internasional; buku akademik; serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Hindu dan persoalan kesejahteraan sosial-ekonomi. Literatur ilmiah kontemporer diprioritaskan pada publikasi periode 2016–2026 berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, sedangkan pembatasan tahun tidak diterapkan pada teks keagamaan Hindu sebagai sumber primer. Data kepustakaan dianalisis melalui identifikasi konsep, kategorisasi tematik, perbandingan argumentasi, dan sintesis konseptual terhadap hubungan *dharma*, *artha*, kesejahteraan, tanggung jawab sosial, dan keadilan sosial-ekonomi. Analisis konseptual-filosofis selanjutnya digunakan untuk mengklarifikasi hubungan antarkonsep dan membangun argumentasi mengenai implikasinya bagi Pendidikan Agama Hindu, mengingat analisis filosofis memungkinkan pengkajian secara lebih mendalam terhadap landasan konseptual dan normatif dalam penelitian pendidikan (Leś, 2021). Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan formulasi konseptual mengenai *dharma* dan *artha* sebagai landasan etis kesejahteraan serta implikasinya bagi reorientasi Pendidikan Agama Hindu.

II. PEMBAHASAN

1. Dharma dan Artha sebagai Struktur Etis Kesejahteraan

Relasi *dharma* dan *artha* dalam *Catur Purusa Artha* menunjukkan bahwa pencapaian kesejahteraan material memperoleh legitimasi dalam kehidupan Hindu, tetapi tidak ditempatkan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. *Artha* diperlukan untuk menopang kehidupan, memenuhi kebutuhan, serta menyediakan sumber daya bagi manusia dalam menjalankan berbagai kewajibannya. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa pencarian kekayaan bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan religius selama berada dalam tatanan tujuan hidup yang seimbang. Sukhada et al. (2026) menjelaskan bahwa *dharma, artha, kama*, dan *moksa* membentuk kerangka kehidupan yang integratif dengan menghubungkan perilaku etis, kesejahteraan material, pemenuhan keinginan, dan pembebasan spiritual. Dalam kerangka tersebut, *artha* memperoleh maknanya melalui keterhubungan dengan tujuan kehidupan lainnya, terutama *dharma* sebagai orientasi moral. Dengan demikian, kesejahteraan dalam perspektif Hindu sejak awal memperlihatkan keterhubungan antara kecukupan material dan kualitas moral kehidupan.

Kedudukan *dharma* menjadi penting karena memberikan batas normatif terhadap proses pencapaian *artha*. Persoalan kesejahteraan, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dengan legitimasi moral dari proses memperolehnya. Prinsip ini ditegaskan dalam *Sarasamuccaya* 261 yang menempatkan *dharma* sebagai dasar dalam usaha memperoleh kekayaan dan sekaligus memberikan arahan terhadap penggunaannya. Dewi et al. (2025) memaknai ketentuan tersebut sebagai prinsip bahwa penghasilan harus diperoleh melalui usaha yang berlandaskan *dharma*, sehingga aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai kebenaran dan tanggung jawab moral. Posisi ini memperlihatkan bahwa *dharma* tidak berfungsi sebagai penolakan terhadap pencapaian material, melainkan sebagai prinsip yang menentukan cara materialitas tersebut diwujudkan. Oleh karena itu, *artha*

yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan *dharma* kehilangan legitimasi etisnya meskipun secara material mampu menghasilkan kemakmuran.

Dimensi etis *artha* tidak berakhir pada proses perolehannya, tetapi berlanjut pada cara kekayaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Kepemilikan *artha* membawa konsekuensi berupa tanggung jawab untuk menempatkan sumber daya material sesuai dengan tujuan kehidupan yang lebih luas. *Sarasamuccaya* 262 memberikan gambaran mengenai pengalokasian hasil usaha untuk kepentingan *dharma*, pemenuhan *kama*, serta pengembangan kembali *artha*. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan tidak diarahkan sepenuhnya untuk konsumsi individual, tetapi dikelola agar mampu menopang kewajiban moral, kebutuhan kehidupan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Wedana (2025) menegaskan bahwa perspektif *Sarasamuccaya* terhadap kemakmuran mencakup kerangka etis dan spiritual dalam pengelolaan kekayaan dengan menempatkan *dharma* sebagai fondasi kesejahteraan. Dengan demikian, kualitas etis *artha* ditentukan bukan hanya oleh sumber perolehannya, tetapi juga oleh orientasi pemanfaatannya.

Hubungan tersebut menghasilkan pemaknaan kesejahteraan yang lebih luas daripada sekadar akumulasi kekayaan. Kecukupan material tetap menjadi unsur penting karena manusia membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan kehidupan dan memenuhi kewajibannya, tetapi ukuran kesejahteraan tidak berhenti pada besarnya kepemilikan. Orientasi *dharma* menempatkan kualitas moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian material, sehingga kesejahteraan terbentuk melalui keselarasan antara kecukupan ekonomi dan cara hidup yang benar. Penelitian mengenai budaya *Catur Purusa Artha* menunjukkan bahwa kerangka tersebut tidak berorientasi semata-mata pada pencarian materi, tetapi menempatkan *dharma* sebagai dasar kehidupan, *artha* sebagai sarana penunjang, serta tujuan kehidupan lainnya dalam suatu orientasi menuju kesejahteraan dan kebahagiaan (Pradnyani & Suardikha, 2022). Perspektif tersebut mengoreksi pemaknaan kesejahteraan yang hanya didasarkan pada kepemilikan material dengan memasukkan dimensi moral sebagai bagian dari kualitas kehidupan manusia.

Berdasarkan relasi tersebut, *dharma* dan *artha* dapat dirumuskan sebagai dua unsur yang membentuk struktur etis kesejahteraan. *Dharma* berfungsi sebagai prinsip normatif yang menentukan legitimasi proses memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya, sedangkan *artha* menyediakan kapasitas material yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan serta menjalankan kewajiban kehidupannya. Hubungan keduanya bersifat komplementer: orientasi moral tanpa dukungan material dapat membatasi kemampuan manusia menjalankan tanggung jawab kehidupan, sedangkan pencapaian material tanpa orientasi moral berpotensi mereduksi kesejahteraan menjadi sekadar akumulasi kekayaan. Sukantiasih (2024) menunjukkan bahwa *Catur Purusa Artha* menempatkan *dharma* sebagai dasar menjalankan kehidupan dan *artha* sebagai kesejahteraan yang diperoleh melalui usaha yang sah, sebelum diarahkan pada pencapaian tujuan kehidupan yang lebih luas. Dengan demikian, struktur etis kesejahteraan dalam relasi *dharma–artha* dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu legitimasi etis dalam memperoleh sumber daya, tanggung jawab dalam mengelolanya, dan orientasi moral dalam memanfaatkannya. Struktur inilah yang selanjutnya membuka pembahasan mengenai bagaimana kesejahteraan individual memiliki konsekuensi terhadap kesejahteraan sosial.

2. Dari Kemakmuran Individual menuju Kesejahteraan Sosial

Kemakmuran individual merupakan bagian yang sah dalam pencapaian *artha*, tetapi relasinya dengan *dharma* membuat pemanfaatan kekayaan tidak berhenti pada pemenuhan kepentingan pribadi. Kemampuan seseorang memperoleh sumber daya material memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membangun kemandirian, dan menjalankan berbagai kewajiban. Namun, dalam kerangka etis Hindu, kepemilikan juga berimplikasi pada cara individu menempatkan dirinya dalam kehidupan bersama. Dewi et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan dalam perspektif kewirausahaan Hindu berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pemanfaatan sebagian kekayaan untuk kepentingan yang melampaui kebutuhan personal. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa *artha* memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Dengan demikian, kemakmuran individual tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai kapasitas material yang dapat menopang kehidupan pribadi sekaligus memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab terhadap sesama.

Dimensi sosial *artha* memperoleh bentuk konkret melalui praktik *dana* atau *dana punia*, yang menempatkan pemberian sebagai bagian dari penggunaan kekayaan berdasarkan *dharma*. Praktik tersebut menunjukkan bahwa sumber daya material tidak sepenuhnya dipahami sebagai kepemilikan yang hanya diarahkan bagi kepentingan pemiliknya, tetapi juga dapat digunakan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain. Kajian Bhawuk (2019) mengenai *dāna* dalam tradisi India menunjukkan bahwa praktik pemberian memiliki landasan spiritual dan sosial yang mendorong individu untuk melampaui keterikatan pada kepemilikan serta mengarahkan sumber daya bagi kepentingan orang lain. Dalam konteks kesejahteraan, prinsip tersebut memberikan makna penting bahwa kemampuan ekonomi membawa ruang bagi terbentuknya solidaritas sosial. *Dana* dengan demikian bukan sekadar tindakan filantropis yang terpisah dari kehidupan ekonomi, tetapi merepresentasikan transformasi *artha* dari kekayaan individual menjadi sumber manfaat sosial.

Orientasi kesejahteraan bersama semakin terlihat melalui konsep *lokasamgraha*, yang memperluas tanggung jawab manusia dari ranah personal menuju pemeliharaan kehidupan sosial. Konsep ini menempatkan tindakan manusia dalam hubungan dengan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap kehidupan orang lain, sehingga keberhasilan individual tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kondisi masyarakat tempat individu hidup. Singh dan Awasthy (2023) menjelaskan *lokasamgraha* sebagai orientasi terhadap *common good* yang mendorong tindakan melampaui kepentingan diri dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi memperoleh makna sosial ketika kemampuan, pekerjaan, dan sumber daya yang dimiliki seseorang turut menghasilkan manfaat bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, relasi *dharma–artha* dapat diperluas dari etika pengelolaan kekayaan individual menjadi orientasi tindakan ekonomi yang mempertimbangkan konsekuensi sosial dari pencapaian kemakmuran.

Perluasan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan individual dan kesejahteraan sosial tidak harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Individu tetap memiliki legitimasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kemakmurannya, tetapi pencapaian tersebut berlangsung dalam struktur sosial yang membuat manusia saling bergantung. Dalam pemikiran Hindu, orientasi ini berdekatan dengan gagasan *jagadhita*, yaitu

kehidupan yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia sebagai bagian dari tujuan kehidupan manusia. Sudarsana (2018) menempatkan *jagadhita* dalam orientasi pendidikan Hindu yang menghubungkan pembentukan manusia dengan terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan. Dalam kerangka tersebut, kesejahteraan tidak hanya dapat dibaca sebagai kondisi personal, tetapi juga sebagai keadaan sosial yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara bermartabat dan harmonis. Dengan demikian, kemakmuran individual memperoleh makna yang lebih utuh ketika keberadaannya tidak mengurangi, tetapi turut menopang kesejahteraan lingkungan sosial.

Berdasarkan hubungan tersebut, pergeseran dari kemakmuran individual menuju kesejahteraan sosial tidak berarti meniadakan hak individu atas *artha*, melainkan memperluas orientasi etis dari kepemilikan menuju kebermanfaatan. *Dharma* mengarahkan individu agar pencapaian material tidak menghasilkan keterputusan dari tanggung jawab sosial, sedangkan *artha* menyediakan kapasitas nyata untuk mewujudkan kepedulian tersebut melalui tindakan ekonomi dan sosial. Purbawangsa et al. (2023) memperlihatkan bahwa implementasi *Catur Purusa Artha* dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa dapat menghubungkan pencapaian ekonomi dengan kepatuhan, pengembangan kelembagaan, serta keharmonisan dengan para pemangku kepentingan. Temuan tersebut memperlihatkan kemungkinan aktualisasi *Catur Purusa Artha* pada ranah yang melampaui kepentingan ekonomi individual. Dengan demikian, kesejahteraan berbasis *dharma–artha* dapat dipahami sebagai kesejahteraan relasional, yaitu kondisi ketika kapasitas material individu berkembang sejalan dengan tanggung jawab, kebermanfaatan, dan kesejahteraan kehidupan bersama.

3. Dharma–Artha dalam Perspektif Keadilan Sosial-Ekonomi

Relasi *dharma* dan *artha* memberikan landasan untuk memahami keadilan sosial-ekonomi tidak hanya berdasarkan hasil akhir berupa kepemilikan kekayaan, tetapi juga berdasarkan proses yang membentuk pencapaian tersebut. Dalam kerangka ini, *artha* merupakan tujuan material yang sah, sedangkan *dharma* memberikan batas normatif agar pencapaiannya tidak dilakukan melalui tindakan yang merugikan pihak lain. Konsekuensinya, keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan kejujuran, kepatuhan terhadap norma, dan penghormatan terhadap kepentingan pihak lain. Dewi et al. (2025) menunjukkan bahwa konsepsi kewirausahaan Hindu menghubungkan pencapaian *artha* dengan prinsip *dharma* melalui pengelolaan kekayaan secara etis, sistem perpajakan yang adil, dan tanggung jawab sosial. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keadilan telah bekerja sejak proses penciptaan kekayaan, bukan hanya setelah kekayaan tersebut terakumulasi. Dengan demikian, dimensi pertama keadilan sosial-ekonomi berbasis *dharma–artha* terletak pada keadilan dalam proses memperoleh sumber daya dan keuntungan ekonomi.

Prinsip tersebut selanjutnya menempatkan aktivitas ekonomi dalam jaringan relasi sosial yang menuntut keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan pihak-pihak yang terdampak oleh tindakannya. Pencapaian keuntungan yang sah secara ekonomi belum tentu memiliki legitimasi etis apabila diperoleh melalui praktik yang mengabaikan hak, kepentingan, atau kesejahteraan pihak lain. *Dharma* dalam konteks ini berfungsi sebagai orientasi yang membatasi dominasi kepentingan diri dalam pencapaian *artha*. Susanti et al. (2024) menunjukkan bahwa

penerapan *dharma* dalam sistem ekonomi dapat diterjemahkan melalui kejujuran, *ahimsa*, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan yang mengarahkan aktivitas ekonomi pada tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif *dharma–artha* juga menyangkut kualitas relasi ekonomi, yakni sejauh mana pencapaian kepentingan individual tetap menghormati martabat, hak, dan kepentingan manusia lain yang berada dalam hubungan ekonomi tersebut.

Keadilan sosial-ekonomi juga berkaitan dengan orientasi pemanfaatan kekayaan setelah *artha* berhasil diperoleh. Kekayaan yang berlandaskan *dharma* tidak kehilangan dimensi individualnya, tetapi penggunaannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari tanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Dalam perspektif ini, kemampuan ekonomi menghasilkan tanggung jawab moral yang semakin besar untuk mengarahkan sebagian sumber daya kepada tindakan yang memberikan manfaat bagi pihak lain. Nova et al. (2026) menunjukkan bahwa uang dan kekayaan dalam filsafat Hindu tidak dipahami sebagai materi yang bebas nilai, tetapi terkait dengan konsekuensi moral dari cara memperoleh dan menggunakannya; penggunaan kekayaan berdasarkan *dharma* dan *dana punia* ditempatkan sebagai sarana menuju kebaikan. Perspektif tersebut memperluas makna distribusi dari sekadar pemindahan sumber daya menjadi aktualisasi tanggung jawab moral pemilik *artha*. Oleh karena itu, dimensi ketiga keadilan sosial-ekonomi berbasis *dharma–artha* terletak pada kebermanfaatan sosial kekayaan, terutama ketika kapasitas material digunakan untuk memperkuat kepedulian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

Orientasi sosial tersebut tidak berarti bahwa keadilan mengharuskan penghapusan kepentingan ekonomi individual atau menyeragamkan kepemilikan material. *Artha* tetap mengakui kebutuhan manusia untuk membangun kemandirian dan kemakmuran, tetapi *dharma* mengarahkan agar pencapaian tersebut berlangsung dalam hubungan yang harmonis dengan kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial-ekonomi berbasis *dharma–artha* lebih tepat dipahami sebagai keseimbangan antara hak untuk mencapai kemakmuran dan kewajiban untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari kemakmuran tersebut. Singh dan Arya (2025) menunjukkan bahwa dalam pemikiran India, *artha* menyediakan basis material bagi kehidupan individu dan komunitas, sedangkan *dharma* memberikan dasar moral bagi aktivitas ekonomi sehingga penciptaan kekayaan dapat berkontribusi terhadap *human flourishing* dan kemakmuran sosial. Relasi tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan individual dan kesejahteraan sosial bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berkembang secara simultan ketika penciptaan kekayaan memperoleh orientasi moral dan sosial yang memadai.

Berdasarkan keseluruhan relasi tersebut, keadilan sosial-ekonomi dalam perspektif *dharma–artha* dapat dirumuskan sebagai tatanan yang memungkinkan pencapaian kesejahteraan material berlangsung melalui proses yang etis, relasi ekonomi yang adil, dan pemanfaatan sumber daya yang memiliki tanggung jawab sosial. Rumusan ini menempatkan *dharma* bukan sebagai penghambat penciptaan kekayaan, tetapi sebagai prinsip normatif yang menentukan kualitas etis pencapaian *artha*. Dalam praktik kelembagaan ekonomi, Purbawangsa et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi *Catur Purusa Artha* memungkinkan pencapaian keuntungan (*artha*) ditempatkan bersama kepatuhan terhadap aturan (*dharma*), pengembangan kelembagaan, dan keharmonisan dengan

para pemangku kepentingan. Atas dasar tersebut, keadilan sosial-ekonomi berbasis *dharma–artha* dapat disintesiskan melalui tiga dimensi utama: keadilan dalam proses memperoleh *artha*, keadilan dalam relasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan *artha*. Ketiga dimensi tersebut sekaligus menyediakan kerangka konseptual untuk membawa persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi ke dalam orientasi Pendidikan Agama Hindu.

4. Reorientasi Pendidikan Agama Hindu Berbasis Etika Kesejahteraan

Pendidikan Agama Hindu memiliki posisi strategis dalam mentransformasikan ajaran keagamaan menjadi orientasi etis yang dapat digunakan peserta didik dalam memahami kehidupan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran agama tidak cukup berhenti pada penguasaan konsep, tetapi perlu mendorong kemampuan menghubungkan ajaran Hindu dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Dalam kurikulum Pendidikan Agama Hindu, *Catur Purusa Artha* telah ditempatkan dalam elemen *susila* dan diarahkan pada penerapan tujuan hidup yang berkaitan dengan pembentukan karakter, nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kehidupan sosial (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Landasan tersebut menyediakan ruang pedagogis untuk memperluas pembelajaran *dharma* dan *artha* dari pemahaman mengenai tujuan hidup menuju refleksi terhadap persoalan kesejahteraan. Reorientasi yang dimaksud, dengan demikian, bukan mengganti substansi ajaran yang telah ada, melainkan memperdalam orientasi pembelajarannya agar peserta didik mampu memahami konsekuensi moral dari cara manusia memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi.

Pembelajaran *Catur Purusa Artha* yang telah berlangsung memberikan fondasi penting bagi pengembangan orientasi tersebut. Materi pembelajaran tidak hanya memperkenalkan pengertian *dharma, artha, kama*, dan *moksa*, tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sukantiasih (2024) menunjukkan bahwa pembelajaran nilai-nilai *Catur Purusa Artha* melalui *Dharma Wacana* dapat berkontribusi terhadap pembentukan moral, spiritualitas, etika, dan karakter peserta didik. Temuan tersebut memperlihatkan kuatnya potensi *Catur Purusa Artha* sebagai basis pendidikan nilai. Namun, potensi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh dengan membawa peserta didik pada pertanyaan etis mengenai realitas sosial-ekonomi, seperti cara memperoleh kekayaan secara benar, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, kepedulian terhadap kelompok yang mengalami keterbatasan ekonomi, serta hubungan antara kemakmuran pribadi dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pembelajaran bergerak dari internalisasi nilai menuju kemampuan menggunakan nilai sebagai kerangka untuk menilai realitas sosial.

Reorientasi tersebut juga membutuhkan perubahan pada cara peserta didik berinteraksi dengan materi pembelajaran. Persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi tidak cukup dipelajari melalui pengenalan konsep dan contoh perilaku, tetapi memerlukan ruang bagi peserta didik untuk menganalisis persoalan nyata, mempertimbangkan berbagai kepentingan, dan memberikan penilaian berdasarkan prinsip *dharma*. Pendekatan berbasis masalah relevan untuk tujuan tersebut karena memungkinkan ajaran *Catur Purusa Artha* ditempatkan dalam situasi kehidupan yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Sudharma (2024) menunjukkan bahwa penerapan *problem-*

based learning dalam pembelajaran *Catur Purusa Artha* dapat mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif, kritis, dan analitis dalam merefleksikan ajaran Hindu. Dalam kerangka etika kesejahteraan, pendekatan tersebut dapat dikembangkan melalui persoalan kontekstual seperti ketimpangan ekonomi, perilaku konsumtif, kejujuran dalam kegiatan ekonomi, praktik berbagi, kemiskinan, atau penggunaan sumber daya bersama. Pembelajaran agama dengan demikian tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai apa yang diajarkan *dharma*, tetapi melatih peserta didik mempertimbangkan bagaimana *dharma* digunakan dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan persoalan ekonomi dan sosial.

Pada tataran materi, reorientasi Pendidikan Agama Hindu berbasis etika kesejahteraan memerlukan keterhubungan yang lebih eksplisit antara *dharma–artha* dan realitas sosial-ekonomi kontemporer. Buku Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas VIII telah mengarahkan pembelajaran *Catur Purusa Artha* pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari serta menghubungkan *artha* dengan pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kesejahteraan (Suparthi, 2021). Ruang tersebut dapat dikembangkan melalui materi kontekstual mengenai etika kerja, kepemilikan dan penggunaan kekayaan, konsumsi, kewirausahaan, solidaritas, ketimpangan, serta tanggung jawab sosial. Pengembangan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah Pendidikan Agama Hindu menjadi pendidikan ekonomi, tetapi menghadirkan dimensi ekonomi sebagai salah satu realitas kehidupan yang memerlukan pertimbangan keagamaan. Melalui orientasi tersebut, peserta didik dapat memahami bahwa keputusan mengenai pekerjaan, pendapatan, konsumsi, dan pemanfaatan kekayaan bukan semata persoalan rasionalitas ekonomi, tetapi juga mengandung konsekuensi moral terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan bersama.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, reorientasi Pendidikan Agama Hindu berbasis etika kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai pengembangan pembelajaran yang menghubungkan pemahaman ajaran, penalaran etis, dan respons terhadap persoalan sosial-ekonomi. Orientasi ini tidak mengurangi kedudukan *Catur Purusa Artha* sebagai tujuan kehidupan, tetapi memperkuat aktualisasinya dengan menjadikan relasi *dharma–artha* sebagai kerangka untuk memahami bagaimana kesejahteraan seharusnya dibentuk dan dipertanggungjawabkan. Kurikulum Pendidikan Agama Hindu sendiri memberikan ruang bagi pengembangan tersebut karena pembelajaran pada elemen *susila* diarahkan pada kemampuan menjabarkan dan menganalisis ajaran etika Hindu dalam kaitannya dengan isu aktual serta moralitas dalam kehidupan sosial dan kenegaraan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021). Atas dasar itu, reorientasi yang ditawarkan dapat dirumuskan melalui tiga orientasi pedagogis, yaitu memahami *dharma–artha* sebagai landasan etis kesejahteraan, menggunakan ajaran tersebut untuk menganalisis persoalan sosial-ekonomi, dan mengaktualisasikannya melalui tindakan yang mengintegrasikan kemakmuran individual dengan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Pendidikan Agama Hindu dengan demikian tidak hanya membentuk individu yang memahami tujuan hidup menurut ajaran Hindu, tetapi juga individu yang mampu memberikan pertimbangan etis terhadap realitas ekonomi dan sosial yang dihadapinya.

III. PENUTUP

Relasi *dharma* dan *artha* menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam perspektif Hindu tidak dapat direduksi pada

pencapaian material semata. *Artha* memiliki legitimasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan membangun kemakmuran, tetapi proses memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya memperoleh orientasi etis melalui *dharma*. Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini merumuskan struktur etis kesejahteraan dalam tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu legitimasi etis dalam memperoleh sumber daya, tanggung jawab dalam pengelolaannya, dan orientasi moral dalam pemanfaatannya. Struktur tersebut menempatkan kemakmuran individual dan tanggung jawab sosial dalam hubungan yang saling melengkapi, sehingga kualitas kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas material yang dimiliki, tetapi juga oleh kebermanfaatannya bagi kehidupan bersama.

Dalam perspektif keadilan sosial-ekonomi, relasi *dharma–artha* menghasilkan tiga dimensi utama, yaitu keadilan dalam proses memperoleh *artha*, keadilan dalam relasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan *artha*. Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi hasil ekonomi, tetapi juga mencakup proses penciptaan kekayaan dan konsekuensi sosial dari penggunaannya. Temuan konseptual ini memberikan dasar bagi reorientasi Pendidikan Agama Hindu dengan memperluas pembelajaran *Catur Purusa Artha* dari pemahaman mengenai tujuan kehidupan menuju pembentukan kemampuan peserta didik dalam membaca persoalan kesejahteraan secara etis. Reorientasi tersebut dapat dikembangkan melalui tiga arah pedagogis, yaitu pemahaman etis terhadap relasi *dharma–artha*, penalaran terhadap persoalan sosial-ekonomi, dan aktualisasi tanggung jawab sosial dalam kehidupan. Dengan orientasi tersebut, Pendidikan Agama Hindu dapat mempertemukan ajaran keagamaan dengan realitas ekonomi kontemporer tanpa kehilangan landasan filosofis dan spiritualnya.

Penelitian ini bersifat konseptual dan bertumpu pada sintesis literatur sehingga formulasi yang dihasilkan belum menguji secara empiris bagaimana orientasi etika kesejahteraan diterapkan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan temuan ini melalui analisis yang lebih spesifik terhadap kurikulum, buku ajar, praktik pembelajaran, maupun pemahaman peserta didik mengenai *dharma, artha*, kesejahteraan, dan keadilan sosial-ekonomi. Pengujian empiris tersebut diperlukan untuk menilai relevansi dan keterterapan kerangka yang dirumuskan sekaligus mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Agama Hindu yang kontekstual terhadap persoalan sosial-ekonomi. Dengan demikian, relasi *dharma–artha* tidak berhenti sebagai konsepsi filosofis mengenai tujuan kehidupan, tetapi dapat dikembangkan menjadi sumber penalaran etis bagi pembentukan kesejahteraan yang berkeadilan dan berorientasi pada kehidupan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368*.

Bhawuk, D. P. S. (2011). *Spirituality and Indian psychology: Lessons from the Bhagavad-Gita*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8110-3

Birher, N. (2025). The return of the soul—The role of religion in regulating social life. *Religions, 16*(2), 252. https://doi.org/10.3390/rel16020252

Dewi, D. S. U., Saklit, I. W., & Prameswara, I. (2025). Konsep kewirausahaan Hindu dalam Veda: Integrasi keseimbangan material dan spiritual di era modern. *Pasupati, 11*(1), 29–54

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (2022). *Catur Purusa Artha: Pijakan menuju puncak kebahagiaan hidup*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Fioramonti, L., Coscieme, L., Costanza, R., Kubiszewski, I., Trebeck, K., Wallis, S., Roberts, D., Mortensen, L. F., Pickett, K. E., Wilkinson, R., Ragnarsdóttir, K. V., McGlade, J., Lovins, H., & De Vogli, R. (2022). Wellbeing economy: An effective paradigm to mainstream post-growth policies? *Ecological Economics, 192*, 107261. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107261

Ihsan, M. A., Mandjarreki, S., & Suparman. (2025). Religion as moral infrastructure: Lived Islam, welfare governance, and the Family Hope Program in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 9*(3). https://doi.org/10.15575/rjsalb.v9i3.47226

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Capaian pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti fase A–F*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Leś, T. (2021). The role of philosophical analysis in contemporary educational research. *Educational Philosophy and Theory, 53*(2), 140–150. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1777850

Michálek, A., Výbošťok, J., & Výbošťoková, T. (2023). Does economic growth reduce multidimensional poverty? Evidence from low- and middle-income countries. *World Development, 161*, 106119. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106119

Nova, K. A., Susanti, K. D., & Oktaviani, D. (2026). Uang dalam lintasan karma (Sebuah kajian filosofi Hindu tentang rejeki dan kebaikan). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi (JME), 3*(2), 1–12.

Pradnyani, N. L. P. N. D., & Suardikha, I. M. S. (2022). Budaya Catur Purusa Artha memoderasi love of money dan sifat Machiavellian terhadap indikasi fraud. *E-Jurnal Akuntansi, 32*(7), 1812–1827.

Purbawangsa, I. B. A., Rahyuda, H., & Wicaksana, K. A. B. (2023). Implementation of Catur Purusa Artha in Village Credit Institution's financial management. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 8*(2), 492–509. https://doi.org/10.23887/jia.v8i2.60466

Shiba, K., Cowden, R. G., Gonzalez, N., Lee, M. T., Lomas, T., Lai, A. Y., & VanderWeele, T. J. (2022). Global trends of mean and inequality in multidimensional wellbeing: Analysis of 1.2 million individuals from 162 countries, 2009–2019. *Frontiers in Public Health, 10*, 824960. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.824960

.

Singh & Awasthy (2023): metadata yang sebelumnya kita koreksi adalah *IIMB Management Review, 35*(4), 344–358, bukan 35(2), 186–197. DOI: 10.1016/j.iimb.2023.04.005.

Sudharma, G. N. P. (2024). Model problem based learning dalam pembelajaran Catur Purusa Artha SMP Negeri 01 Belitang III. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 7*(2), 111–126.

Sudarsana, I. K. (2018). Implementasi pendidikan informal Hindu dalam menjaga pola komunikasi remaja

pada pergaulan sehari-hari. *Jurnal Komunikasi, 12*(1), 40–50.

Sukhada, S., Rawat, S., & Nandram, S. (2026). The spiritual theory of human pursuits: An integrative view of four life goals. *International Journal of Indian Culture and Business Management, 38*(1), 1–19. https://doi.org/10.1504/IJICBM.2026.154071

Sukantiasih, N. M. (2024). Telaah tema Dharma Wacana berdasarkan nilai-nilai Catur Purusa Artha di SD No 3 Penarungan. *Widyalaya: Jurnal Ilmu Pendidikan, 5*(2), 238–245

Susanti, K. D., Oktaviana, D., & Kusuma, A. A. G. M. (2024). Implementasi ajaran Dharma dalam sistem ekonomi Pancasila. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*.

Suparthi, N. K. (2021). *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk SMP kelas VIII*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Tiwari, S. K., & Tiwari, V. K. (2023). Economics in the Indian knowledge system: A philosophical survey. *International Journal of Innovations in Science, Engineering and Management, 2*(2), 68–78. https://doi.org/10.69968/ijisem.2023v2i268-78

Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review, 15*(4), 404–428. https://doi.org/10.1177/1534484316671606

Wedana, I. W. B. C. (2025). Teologi kemakmuran dalam Kitab Sarasamuccaya. *Sphatika: Jurnal Teologi, 16*(2). https://doi.org/10.25078/sphatika.v16i2.5482